

Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/202 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2022 Tanggal 17 November 2021;
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022, yaitu :

Nama : Yusti Rahayu, S.H.

NIP : 19851106 201012 2 001

Pangkat/Gol Ruang : Penata/IIIc

KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan umum Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan atas seluruh kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum;
2. Melakukan penginputan terhadap barang yang akan dilaksanakan secara swakelola maupun pengadaan;

Berkoordinasi...

3. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi terkait seluruh kegiatan Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Januari 2022

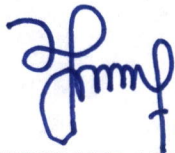
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

Ttd.

TITON PRAYOGA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 5/HK.03.2/3273/2022

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

Undang Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2022 Tanggal 17 November 2021;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT ISNTANSI (SAKTI) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
- KEDUA : User, Pejabat, Operator dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEKEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Titon Prayoga', is positioned above the printed name.

TITON PRAYOGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR : 5/HK.03.2/3273/2022
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT ISNTANSI (SAKTI) SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2022

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT ISNTANSI (SAKTI) SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Peran
1	Titon Prayoga SIP. 19801113 200902 1 004	Sekretaris	KPA
2	Aris Krismanto, SE 19771225 201012 1 002	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	PPK
3	Lisma Nadia Ismatina, S.Sos, M.AP. 19800926 201012 2 002	Kasubag Program dan Data	PPSPM
4	Kiki Pratiwi Sitorus, S.H. NIP. 19860324 201012 2 005	Pelaksana	Operator Anggaran
5	Wulan Rahmafurry, A.Md. NIP. 19830830 200902 2 006	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
6	Dede Sopian, S.IP NIP. 198212292007011002	Pelaksana	Operator Persediaan
7	Aris Krismanto, SE 19771225 201012 1 002	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Approver Persediaan

8	Dede Sopian, S.IP NIP. 198212292007011002	Pelaksana	Operator Aset
9	Aris Krismanto, SE NIP.19771225 201012 1 002	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Validator Aset
10	Titon Prayoga SIP. NIP.19801113 200902 1 004	Sekretaris	Approver Aset
11	Rifqi Rahman,SE. NIP.19851013 201012 1 006	Pelaksana	Operator Pelaporan
12	Ilah Islahiah, S.Kom,M.M. NIP. 19820624 200902 2 007	Pelaksana	Admin Operator Pembayaran Operator Komitmen

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,
ttd.

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA